

IMPLEMENTASI *IMPERATIVE* DI PEMERINTAH KOTA BANJAR DALAM RANGKA PENYUSUNAN STRATEGI KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

Ade Supriatna
STMIK Subang
E-mail: adespr@yahoo.com

Abstract

Banjar city government of West Java, in carrying out the government has implemented the management of computing, as an aid in the management of the city government administration. However, an assessment of whether the Banjar city government has implemented strategies in the use of information technology, still need more in-depth research and study. Various approaches to the application of information technology to do. But for the early stages necessary to make adjustments to the organizational culture adopted, because the application of information technology is closely related to human resources. There have been many proposed approach to assessing organizational culture, each is seen from different viewpoints. One approach to assessing organizational culture is the Competing Values Framework (CVF). CVF is built based on the reality of what happened in the organization. To assess the organizational culture of the city government of Banjar, can used OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument). OCAI instrument in the form of a questionnaire, which must be filled by members of the organization. If we find a source of reference for the government in terms of policy strategy certainly a great deal of information technology. One example of a strategy for information technology policy is applied in the British government, which 8Imperative. But could not categorically be applied in Indonesia, especially in Government Banjar, because the internal and external environment is not the same government. Therefore it is necessary adjustments as needed.

Keywords: *CVF, OCAI, 8Imperative*

Abstrak

Pemerintah kota Banjar Jawa Barat, dalam melaksanakan manajemen pemerintahan telah menerapkan komputasi, sebagai alat bantu dalam pengelolaan administrasi pemerintah kota. Akan tetapi penilaian tentang apakah Pemerintah kota Banjar tersebut telah menerapkan strategi dalam penggunaan teknologi informasi, masih perlu penelitian dan pengkajian lebih mendalam. Berbagai pendekatan untuk penerapan teknologi informasi dapat dilakukan. Akan tetapi untuk tahap awal perlu dilakukan penyesuaian dengan budaya organisasi yang dianut, karena penerapan teknologi informasi erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Telah banyak pendekatan yang diusulkan untuk menilai budaya organisasi, masing-masing dipandang dari sudut pandang yang berbeda. Salah satu pendekatan untuk menilai budaya organisasi adalah *Competing Values*

Framework (CVF). *CVF* dibangun berdasarkan realitas yang terjadi di dalam organisasi tersebut. Untuk menilai budaya organisasi Pemerintah kota Banjar, dapat menggunakan *OCAI (Organizational Culture Assesment Instrument)*. Instrument *OCAI* berupa kuisioner, yang harus diisi oleh anggota organisasi. Kalau kita cari sumber acuan bagi pemerintah dalam hal strategi kebijakan teknologi informasi tentunya banyak sekali. Salah satu contoh tentang strategi untuk kebijakan teknologi informasi adalah yang diterapkan di pemerintah Inggris, yaitu *8Imperative*. Akan tetapi tidak bisa secara mentah-mentah diterapkan di Indonesia khususnya di Pemerintahan Kota Banjar, karena lingkungan internal dan eksternal pemerintahan tidak sama. Oleh karena itu perlu penyesuaian sesuai kebutuhan.

Kata Kunci: CVF, OCAI, 8Imperative

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintah selayaknya semakin hari semakin efektif dan efisien. Adanya dukungan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting, dalam rangka perbaikan kualitas layanan kepada masyarakat. *IT Assets* perlu dikelola dengan baik. Salah satu acuan pendekatan dalam penerapan strategi kebijakan teknologi informasi adalah yang digunakan di pemerintah Inggris, yaitu *8 Imperative*.

Kota Banjar pada awalnya merupakan suatu kecamatan, yang dulunya bagian dari Kabupaten Ciamis, ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan sejak tanggal 11 Desember 2002 ditetapkan menjadi kota (otonom), yang terpisah dari Kabupaten Ciamis.

Kota Banjar secara administratif terdiri dari 4 kecamatan, 22 desa yang memiliki luas wilayah 13.197,23 km². Keempat Kecamatan tersebut adalah Banjar, Pataruman, Purwaharja, dan Langensari. Kecamatan Pataruman mempunyai wilayah terluas, kurang lebih 36% dari keseluruhan daerah Kota Banjar. Mata pencaharian penduduk, berurutan mulai dari yang terbesar, adalah petani (22.606), buruh tani (18.162), pedagang (10.574), pegawai negeri (5.666), swasta (4.326), pertukangan (3.990), dan industri (799).

Kota Banjar mempunyai potensi unggulan di Industri dan Perdagangan, Pariwisata, dan Pertanian. Potensi Industri dan Perdagangan meliputi Produksi Bata Merah, Genteng, Gula Merah, dan Kayu Olahan. Potensi Pariwisata meliputi Lapangan Golf 9 Hole (Citanduy Golf Club), Wisata Alam/ Gunung Situmustika, Wisata Budaya Pulo Majeti, Wisata Air Sungai Citanduy, Wisata Budaya Calang, Bangunan Bersejarah Gedung Delapan dan Gedung Empat. Potensi Pertanian meliputi Tanaman Padi, Sayuran, Buah-Buahan, Produksi Hutan Rakyat, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan.

1.1 Rumusan Masalah

Menurut survei, baik secara langsung atau tak langsung, bahwa di Pemerintah Kota Banjar dapat ditentukan rumusan masalahnya sebagai berikut :

- a. Akses masyarakat yang melibatkan penggunaan teknologi informasi masih kurang, sehingga apabila terus menerus masih dilakukan manual, dikhawatirkan dalam menurunkan partisipasi masyarakat dan melemahkan semangat aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Pemakaian alat-alat yang mendukung terhadap penerapan teknologi informasi masih

terbatas, walaupun secara sederhana telah dilakukan informasi pemerintah di *web site*, akan tetapi secara jangka panjang masih harus lebih ditingkatkan dalam hal penggunaan alat-alat teknologi yang dipakai.

- c. Kemampuan sumber daya manusia sebagai aparatur pemerintah masih relatif minim dalam hal, penguasaan teknologi informasi secara terintegrasi.

1.2 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini tidak semua *imperative* dibahas, akan tetapi hanya membahas salah satu *imperative* saja, yaitu *imperative 5* tentang *Protect Privacy and Security*. Tentang Perlindungan privasi dan keamanan adalah hal yang sangat fundamental. Karena terkait dengan penggunaan alat-alat teknologi informasi secara langsung, dan ini harus mendapat perlindungan, dari keamanan dan kenyamanan penggunaannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan kondisi yang sedang dihadapi Pemerintah Kota Banjar, sebelum mengadopsi suatu Strategi Kebijakan Teknologi Informasi dari referensi atau contoh yang sudah diterapkan di negara lain. Kemudian selanjutnya sebagai tahap awal perlu adanya penyesuaian dengan budaya organisasi pemerintah dalam negara kita secara umum. Karena pada dasarnya kultur budaya organisasi kita sangat berbeda dengan negara lain. Kita tidak dapat secara serta merta menerapkan model penerapan Strategi Kebijakan Teknologi Informasi negara lain, dan belum tentu cocok.

2. Tinjauan Pustaka

8Imperative merupakan suatu contoh penerapan Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di pemerintah Inggris. Dari

imperative pertama sampai terakhir dijelaskan berkaitan dengan penggunaan *Information Technology*.

Tahapan-tahapan dalam 8Imperative :

1. *Focus on how IT can reshape work and public sector strategies.*

Problem : Adanya kebutuhan Pengetahuan dalam keberhasilan penerapan IT.

Hal yang harus dihindari : Jangan mendelegasikan semua tanggung jawab teknologi secara sembarangan.

Apa yang dilakukan : Mempelajari teknologi digital dan komunikasi.

2. *Use IT for strategic innovation, not simply tactical automation*

Problem : Seringkali terjadinya kompromi dalam menggunakan ukuran terhadap IT.

Hal yang harus dihindari. Tidak fokus dalam pengembangan inovasi.

Apa yang dilakukan. Mendorong adanya pengembangan strategi inovasi.

3. *Utilize best practices in implementing IT initiatives*

Problem : Kegagalan dalam inisiasi IT karena disebabkan masalah politis.

Hal yang harus dihindari : Jangan mendelegasikan IT secara sembarangan

Apa yang dilakukan : Mempersiapkan implementasi teknologi terhadap perubahan manajemen, menempatkan manajer umum dan kepemimpinan yang kapabel

dalam inisiasi *Information Technology* secara umum.

4. *Improve budgeting and financing for promising IT initiatives*

Problem. Penerapan IT bernilai tinggi dan bersifat jangka panjang.

Hal yang harus dihindari: Anggaran Pajak tinggi.

Apa yang dilakukan: Analisa ekonomi dan anggaran.

5. *Protect privacy and security*

Problem: Sebagai teknologi komunikasi online, isu privasi dan keamanan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang harus dihindari: Jangan terjadi salah memahami akan *privacy and security issues*.

Apa yang dilakukan: Secara minimal, memahami dan implementasi informasi praktis dan keamanan informasi.

6. *Form IT-related partnerships to stimulate economic development*

Problem: Kemampuan IT terbesar sering membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Hal yang harus dihindari: Mengabaikan peluang, sejak Internet telah berperan dalam jaringan.

Apa yang dilakukan: Mobilisasi publik dan inisiasi secara spesifik akan *stakeholders*.

7. *Use IT to promote equal opportunity and healthy communities*

Problem: Dekade terbaru sudah memproduksi meningkatkan ketidaksamaan dalam distribusi pendapatan dan pengaruh politis

Hal yang harus dihindari : Jangan mencoba untuk menyelam isu ini dengan mengumpamakan terlalu susah dipakai untuk memperbaiki.

Apa yang dilakukan : Memperjelas apa layanan universal, bisa berarti jaringan digital *broadband*.

8. *Prepare for digital democracy*

Problem: *Networking digital* sedang berkembang lewat batas nasional dan regional menghasilkan permasalahan serius untuk kebijakan.

Hal yang harus dihindari : Jangan mengasingkan diri terhadap permasalahan global.

Apa yang dilakukan : Adakan percobaan untuk membuat keikutsertaan online dalam percaturan politik.

3. Metode Penelitian

3.1 SWOT Analisis

Analisis organisasi untuk mengetahui **kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman** terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan SWOT analisis.

- a. Kekuatan yang dimiliki Pemerintah Kota Banjar Jawa Barat (S)
- b. Dibandingkan daerah lain, Pemerintah Kota Banjar Jawa Barat memiliki beberapa produk unggulan, seperti yang telah dipaparkan di Pendahuluan. Dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka transformasi ke daerah lain perlu ditangani secara profesional.
- c. Kelemahan yang dimiliki Pemerintah Kota Banjar Jawa Barat (W)
- d. Kemampuan sumber daya manusia dalam Pemerintah Kota Banjar, masih perlu ditingkatkan

untuk mendukung pelaksanaan penerapan teknologi informasi.

- e. Peluang yang dimiliki Pemerintah Kota Banjar Jawa Barat (O)
- f. Daerah-daerah di sekitar Pemerintah Kota Banjar, membutuhkan produk-produk yang dihasilkan daerah ini, sehingga terbuka peluang untuk penambahan pemasukan sebagai aset pemerintah. Kekayaan sumber daya alam merupakan salah satu dukungan yang cukup signifikan untuk menjadikan Pemerintah Kota Banjar sebagai daerah yang memiliki aset yang cukup potensial dalam pengembangan kota di masa mendatang.
- g. Ancaman yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Banjar (T)

Hal-hal yang dapat dianggap sebagai ancaman dalam penyelenggaraan Pemerintah antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pemerintah Kota Banjar
2. Sarana dan prasarana untuk penerapan teknologi informasi
3. Keterlibatan akses masyarakat dalam mendukung program pemerintah, dll.

3.2. *Competing Value Framework*

Untuk mengenal tentang budaya organisasi seperti apa yang sedang berlangsung di Pemerintah Kota Banjar dapat dilakukan dengan *CVF* (*Competing Value Framework*) Salah satu pendekatan untuk menilai budaya organisasi adalah *Competing Values Framework*. *CVF* dibangun berdasarkan realitas yang terjadi di dalam organisasi tersebut

3.3. *Organizational Culture Assesment Instrument*

Sedangkan instrument untuk melakukan penilaian budaya organisasi menggunakan *Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI)*. Instrument *OCAI* berupa kuisisioner, terdiri dari 6 pertanyaan, yang harus diisi oleh anggota organisasi. Setiap pertanyaan terdiri dari 4 alternatif, yang menggambarkan 4 budaya dalam *CVF*. Setiap alternatif jawaban diberi nilai antara 0-100. Alternatif jawaban yang paling sesuai dengan keadaan organisasi saat ini diberi nilai yang paling tinggi.

3.4. *IT Assets Management* yang baik

Pemerintah Kota Banjar harus sudah memikirkan secara jangka panjang tentang *IT Assets* yang dimiliki oleh Pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Apa tujuan *IT Assets Management* ?

1. Penghematan biaya (*Reduce Cost*)
2. Efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka penerapan Strategi Kebijakan Teknologi Informasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Imperative ke 5 (Protect Privacy and Security), merupakan salah satu imperitive dimana terdiri dari pedoman-pedoman yang terkait privasi dan keamanan.

Pedoman Proteksi Privasi dan Keamanan adalah sebagai berikut :

1. Adopsi standar yang sesuai
 - a. *Availability*: akses dan layanan yang handal.
 - b. *Confidentiality*: Akses tersedia untuk para pemakai.
 - c. *Authentication*: Pernyataan sesuai dengan data/fakta.

- d. *Integrity*: Perlindungan data terhadap perubahan yang tak diijinkan.
 - e. *Non-repudiation*: Bukti akan tindakan (mengamati suatu file, mengirim email) yang terjadi dan para pemakai bisa diidentifikasi
2. Pembelajaran dengan melibatkan stakeholders dalam menyelidiki privasi dan keamanan
 3. Beri perhatian yang cukup untuk level eksekutif dalam mengeluarkan kebijakan informasi
 4. Rencanakan privasi keamanan sebelum mengumpulkan data atau membangun sistem
 5. Adakan keselarasan kebijakan informasi dengan yurisdiksi lain
 6. Dukung pengembangan teknik dan teknologi baru
 7. Menggunakan IT untuk meningkatkan privasi dan kemanan, tidak hanya memelihara

5. Kesimpulan

Penerapan 8Imperative dalam rangka Penyusunan Strategi Kebijakan Teknologi Informasi di Pemerintah Kota Banjar Jawa Barat, nampaknya akan kesulitan jika model budaya organisasi di Pemeritahan umumnya dan Pemerintah Kota Banjar Khususnya tidak diubah ke arah keluar dan bersifat *adhocracy*. Budaya organisasi yang sekarang cenderung Hierarki (Terstruktur).

Adanya dukungan sarana dan prasarana untuk penerapan teknologi informasi, serta pengelolaan aset teknologi informasi dengan benar.

Daftar Pustaka

Eight Imperative, THE HARVARD POLICY GROUP ON NETWORK-ENABLED SERVICES AND GOVERNMENT JOHN F. K

ENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT.

Targowski Andrew S., *Electronic Enterprise: Strategy and Architecture*, Western Michigan University, USA.